

MAKALAH
ANALISIS INVESTASI PUBLIK
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh :

Kelompok 5

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Icha Fera Nika | 2313031065 |
| 2. Lusi Yana Agustina | 2313031069 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta berbagai upaya, tugas makalah mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang berjudul “**Analisis Investasi Publik**” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ibu Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. Selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-sebaiknya, berdasarkan pengetahuan dan beberapa referensi yang kami ambil, meskipun tidak lengkap.

Di samping itu, apabila dalam makalah ini didapati kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

Wassaamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 20 September 2025

Kelompok 5

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Program Investasi Publik	3
2.2 Penentuan Kebutuhan Investasi Publik	5
2.3 Aspek Kelayakan	7
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Publik	9
2.5 Teknik Dasar Penilaian Investasi Pulik.....	11
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
STUDI KASUS	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui dana yang berasal dari anggaran negara maupun daerah, pemerintah membiayai berbagai proyek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Namun, pelaksanaan investasi publik sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, serta masalah efektivitas dalam penggunaan dana.

Peran investasi publik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, dan meningkatkan minat investasi swasta. Selain itu, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi publik harus melalui analisis yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Investasi publik juga berfungsi untuk pemerataan pembangunan. Jika pembangunan hanya berpusat di kota besar, maka akan muncul kesenjangan dengan daerah lain. Dengan alokasi dana yang tepat, investasi publik dapat memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta menghadirkan keadilan sosial yang lebih merata. Masyarakat di daerah terpencil pun diharapkan bisa merasakan dampak positif dari kebijakan investasi publik yang dijalankan pemerintah.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam investasi publik menjadi semakin penting di era keterbukaan informasi. Kasus penyalahgunaan anggaran dan proyek mangkrak membuat masyarakat ragu terhadap efektivitas investasi publik. Karena itu, analisis yang menyeluruh diperlukan, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan politik. Dengan pendekatan ini, investasi publik dapat benar-benar menjadi

sarana untuk mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini kami pihak penulis akan membahas mengenai Analisis Investasi Publik yang dapat ditulis dalam rumusan sebagai berikut:

1. Apa saja program dalam investasi publik?
2. Bagaimana penentuan kebutuhan investasi publik?
3. Bagaimana aspek kelayakan dalam investasi publik?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik?
5. Bagaimana teknik dasar penilaian investasi publik?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditulis tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami program investasi publik.
2. Untuk mengetahui dan memahami penentuan kebutuhan investasi publik.
3. Untuk mengetahui dan memahami aspek kelayakan investasi publik.
4. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik.
5. Untuk mengetahui dan memahami teknik dasar penilaian investasi publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Investasi Publik

Program investasi publik adalah serangkaian kegiatan atau proyek yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini biasanya dibiayai melalui anggaran negara maupun anggaran daerah dan diarahkan pada pembangunan sektor-sektor penting, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi. Melalui program investasi publik, pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Anggaran investasi publik erat kaitannya dengan apa yang disebut penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses menilai dan menganalisis proyek-proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan bisa dimasukkan ke dalam anggaran. Agar proyek investasi publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif, diperlukan analisis yang mendalam sebelum diputuskan. Analisis ini berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran, alokasi sumber daya, serta manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik biasanya dipisahkan dari anggaran rutin (*daily budget*) melalui konsep yang disebut *capital budgeting* atau penganggaran modal, sehingga penggunaannya lebih fokus untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang.

Di banyak negara berkembang, pemisahan antara anggaran pembangunan dan anggaran rutin sering menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan publik. Beberapa masalah utama yang biasanya muncul dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memastikan program komprehensif

Program investasi publik yang diajukan harus benar-benar menyeluruh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya berfokus pada sebagian kecil kepentingan.

b. Memperkirakan pengeluaran masa depan

Setiap program investasi harus disertai dengan perkiraan biaya jangka panjang agar tidak membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya dan tetap berkesinambungan.

c. Mengevaluasi relevansi proyek

Proyek-proyek yang sedang berjalan perlu ditinjau ulang untuk menilai apakah masih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jika tidak sesuai lagi, maka harus dihentikan atau dialihkan agar dana publik tidak terbuang percuma.

d. Mengembangkan analisis dan perencanaan

Diperlukan perencanaan yang baik untuk menyeimbangkan antara pengeluaran investasi jangka panjang dan pengeluaran rutin sehari-hari, sehingga pembangunan tetap berlanjut tanpa mengorbankan layanan publik.

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup :

1. Inventarisasi investasi

Tahap awal adalah mencatat semua investasi yang sudah ada. Tujuannya agar pemerintah mengetahui dengan jelas aset atau fasilitas apa saja yang sudah dimiliki.

2. Daftar nama, jenis, nilai, dan kondisi barang modal

Inventarisasi ini harus memuat data lengkap, seperti nama aset, jenis investasi, nilai atau harga, serta kondisi barang modal saat ini, apakah masih baik atau sudah rusak.

3. Cakupan layanan dengan investasi yang ada

Pemerintah perlu menilai sejauh mana investasi yang ada sekarang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah sudah mencukupi atau masih terbatas.

4. Tambahan cakupan layanan

Selanjutnya dihitung kebutuhan tambahan pelayanan baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Hal ini penting agar pemerintah bisa

menyesuaikan investasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

5. Inventarisasi kebutuhan investasi

Setelah itu, pemerintah menyusun daftar kebutuhan investasi baru yang harus dipenuhi untuk menutupi kekurangan atau memperluas layanan publik.

6. Evaluasi kelayakan investasi

Sebelum diputuskan, setiap usulan investasi harus dievaluasi apakah layak atau tidak untuk dilaksanakan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

7. Kriteria kelayakan investasi

Kelayakan investasi biasanya ditinjau dari aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial, dan distribusi. Untuk memastikan hasilnya lebih akurat, pemerintah dapat menggunakan alat analisis seperti NPV (*Net Present Value*), IRR (*Internal Rate of Return*), ARR (*Accounting Rate of Return*), PP (*Payback Period*), *Cost-Benefit Analysis*, atau *Cost-Effectiveness Analysis*.

2.2 Penentuan Kebutuhan Investasi Publik

Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah :

1. Investasi penggantian

Investasi penggantian adalah jenis investasi yang dilakukan untuk mengganti sarana atau fasilitas yang sudah rusak, usang, atau tidak bisa lagi digunakan dengan baik. Misalnya, jalan yang rusak parah sehingga membahayakan pengguna harus diperbaiki atau diganti dengan jalan baru. Contoh lainnya adalah penggantian peralatan rumah sakit yang sudah tua

dengan mesin modern agar pelayanan kesehatan lebih optimal. Tujuan utama dari investasi penggantian adalah memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Investasi penambahan kapasitas

Investasi penambahan kapasitas dilakukan ketika fasilitas yang ada sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Misalnya, sekolah yang muridnya terus bertambah sehingga membutuhkan ruang kelas tambahan, atau rumah sakit yang menambah jumlah tempat tidur karena jumlah pasien semakin banyak. Dengan adanya penambahan kapasitas, sarana publik bisa menampung lebih banyak orang dan memberikan layanan yang lebih baik.

3. Investasi baru

Investasi baru adalah investasi yang dilakukan untuk membangun fasilitas atau sarana yang sebelumnya belum ada. Contohnya pembangunan jalan tol baru di wilayah yang belum memiliki akses transportasi memadai, pembangunan bendungan untuk sumber air bersih, atau pembangunan rumah sakit di daerah terpencil. Investasi baru biasanya bertujuan untuk membuka akses, meningkatkan pelayanan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, setiap jenis investasi publik memerlukan perencanaan yang matang agar dana yang digunakan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah harus menilai prioritas mana yang lebih mendesak antara penggantian, penambahan kapasitas, atau pembangunan baru. Misalnya, jika ada fasilitas vital yang sudah tidak layak pakai, maka investasi penggantian harus segera dilakukan. Namun, jika kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara fasilitas yang ada masih berfungsi, maka penambahan kapasitas lebih tepat dijalankan. Sedangkan pembangunan investasi baru biasanya dilakukan untuk membuka akses layanan yang sama sekali belum tersedia di suatu wilayah.

Keberhasilan investasi publik juga sangat bergantung pada pengawasan dan evaluasi. Proyek yang dijalankan harus dipantau secara berkala agar sesuai dengan rencana, baik dari segi anggaran, kualitas, maupun waktu pelaksanaan.

Evaluasi juga diperlukan untuk menilai apakah investasi yang sudah dilakukan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awal. Dengan adanya pengawasan yang baik, pemerintah dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran, meningkatkan efisiensi, serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal dari setiap investasi publik.

Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal biasanya mengikuti masa manfaat barang tersebut. Jika masa pakai atau umur ekonomis barang modal sudah habis, maka perlu dilakukan pembelian barang baru sebagai pengganti. Dalam menilai investasi publik, penting untuk mempertimbangkan dua hal, yaitu umur ekonomis dan umur teknis barang modal. Umur ekonomis adalah perkiraan berapa lama barang tersebut bisa memberikan manfaat secara efektif, sedangkan umur teknis adalah seberapa lama barang itu masih bisa digunakan sampai akhirnya benar-benar tidak berfungsi. Jika barang modal sudah usang dan tidak bisa lagi memberikan manfaat, artinya umur teknisnya sudah berakhir dan perlu diganti dengan yang baru.

Sementara itu, investasi untuk menambah barang modal biasanya dilakukan jika ada kebutuhan pelayanan yang semakin besar. Jumlah tambahan barang modal yang diperlukan bergantung pada tingkat produktivitas dari barang yang sudah ada. Produktivitas ini diukur dari perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Rasio tersebut menunjukkan seberapa efisien barang modal dalam bekerja. Jika barang modal yang ada sudah tidak efisien, sementara kebutuhan pelayanan terus meningkat, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

2.3 Aspek Kelayakan

Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan

anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

a. Aspek teknis

Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.

b. Aspek Sosial dan Budaya

Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan.

c. Aspek Ekonomi dan Finansial

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan.

d. Aspek Distribusi

Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi, darimana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak, apakah proyek dilaksanakan

oleh public agencies atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (*equity equality*).

Selain aspek-aspek di atas, dalam perencanaan dan analisis investasi publik juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Artinya, proyek yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga tetap bermanfaat dalam jangka panjang. Misalnya, pembangunan jalan baru harus memperhitungkan kualitas bahan dan perawatan agar bisa digunakan dalam waktu lama, bukan hanya beberapa tahun. Dengan begitu, investasi yang dilakukan tidak sia-sia dan benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak kalah penting, aspek partisipasi masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam investasi publik. Masyarakat sebagai penerima manfaat sebaiknya dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kebutuhan yang ada di lapangan sesuai dengan proyek yang dijalankan pemerintah. Partisipasi ini bisa berupa masukan, konsultasi publik, atau survei kebutuhan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proyek investasi akan lebih tepat sasaran, meningkatkan rasa memiliki, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Publik

Investasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Berbagai faktor dapat memengaruhi besar kecilnya investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi investasi publik.

1. Tingkat Suku Bunga

Perubahan suku bunga dapat memengaruhi keputusan pemerintah dalam melakukan investasi publik. Ketika suku bunga tinggi, biaya untuk memperoleh pembiayaan akan meningkat, sehingga investasi cenderung ditunda atau dikurangi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah memberi peluang bagi pemerintah untuk mengakses dana dengan bunga lebih

ringan, sehingga memungkinkan pelaksanaan lebih banyak proyek pembangunan.

2. Pengeluaran Pemerintah

Besar kecilnya belanja negara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan investasi publik. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar lainnya menjadi bentuk nyata dari investasi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

3. Risiko dan Ketidakpastian Ekonomi

Ketidakpastian kondisi ekonomi, baik secara global maupun domestik, dapat menghambat investasi publik. Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek jangka panjang jika prospek ekonomi dinilai tidak stabil. Risiko seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi tinggi, dan ketidakpastian kebijakan juga menjadi pertimbangan penting.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan aktivitas ekonomi memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan investasi. Ketika pendapatan negara tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang bersifat produktif dan strategis.

5. Kualitas Tata Kelola dan Institusi

Kualitas lembaga pemerintah dalam mengelola anggaran dan proyek pembangunan turut menentukan keberhasilan investasi publik. Pemerintahan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi akan mampu melaksanakan investasi yang efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan birokrasi yang rumit dapat menyebabkan proyek mengalami keterlambatan bahkan kegagalan.

6. Infrastruktur yang Tersedia

Kondisi infrastruktur yang sudah ada menjadi pertimbangan penting dalam penentuan lokasi dan jenis investasi publik. Daerah yang belum memiliki sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas

pendidikan umumnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam menyalurkan investasi agar terjadi pemerataan pembangunan.

7. Faktor Demografis

Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan migrasi ke wilayah tertentu akan meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan publik. Pemerintah perlu menyesuaikan arah investasi publik berdasarkan tekanan demografis tersebut, seperti membangun fasilitas umum baru di daerah yang jumlah penduduknya meningkat pesat.

2.5 Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik

Penilaian investasi publik adalah proses untuk menentukan kelayakan suatu proyek yang didanai oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang akan timbul. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian ini mencakup metode-metode yang mempertimbangkan nilai waktu uang, serta analisis biaya dan manfaat.

1. Metode Nondiscounting

Metode nondiscounting tidak memperhitungkan perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Artinya, arus kas di masa depan dianggap sama nilainya dengan uang saat ini. Dua teknik utama dalam kategori ini adalah:

a) *Payback Period* (Periode Pengembalian Modal)

Mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas masuk. Meskipun sederhana, metode ini tidak memperhitungkan arus kas setelah periode pengembalian dan tidak mempertimbangkan nilai waktu uang.

b) *Average Rate of Return* (ARR)

Menghitung rasio rata-rata laba bersih terhadap investasi awal. ARR memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian rata-rata, namun juga tidak memperhitungkan nilai waktu uang atau risiko secara eksplisit.

2. Metode Discounting

Metode *discounting* memperhitungkan nilai waktu uang, yaitu bahwa uang yang diterima di masa depan memiliki nilai lebih rendah

dibandingkan uang yang diterima saat ini. Beberapa metode dalam kategori ini antara lain:

a. *Net Present Value (NPV)*

Menghitung selisih antara nilai sekarang dari manfaat dan biaya proyek. Proyek dianggap layak jika $NPV \geq 0$, menunjukkan bahwa manfaat melebihi biaya.

b. *Internal Rate of Return (IRR)*

Tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. Proyek dianggap layak jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang diinginkan.

c. *Benefit-Cost Ratio (BCR)*

Perbandingan antara nilai sekarang manfaat dan biaya. Proyek dianggap layak jika $BCR > 1$, menunjukkan bahwa manfaat melebihi biaya.

3. Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*)

Analisis biaya-manfaat adalah teknik yang membandingkan total manfaat yang diharapkan dari suatu proyek dengan total biayanya. Semua manfaat dan biaya dikonversi ke dalam nilai moneter dan dihitung nilai sekarangnya. Teknik ini berguna untuk menilai apakah suatu proyek memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan biayanya.

4. Analisis Efektivitas Biaya (*Cost-Effectiveness Analysis*)

Jika manfaat suatu proyek sulit diukur dalam nilai moneter, analisis efektivitas biaya digunakan. Teknik ini membandingkan biaya untuk mencapai hasil tertentu dengan alternatif lain. Misalnya, dalam sektor kesehatan, dapat digunakan untuk membandingkan biaya per unit pengurangan angka kematian antara dua program kesehatan.

5. Penggunaan Kombinasi Teknik

Dalam praktiknya, sering kali digunakan kombinasi dari beberapa teknik di atas untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelayakan suatu proyek. Misalnya, NPV dan IRR dapat digunakan bersama-sama untuk menilai aspek finansial, sementara analisis biaya-manfaat digunakan untuk menilai dampak sosial.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Investasi publik merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui berbagai proyek seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi. Dengan adanya investasi publik, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil, dapat merasakan manfaatnya. Program investasi ini dirancang melalui proses penganggaran modal yang ketat, memastikan alokasi dana yang tepat sasaran dan tidak membebani anggaran di masa depan.

Penentuan kebutuhan investasi publik meliputi inventarisasi aset yang sudah ada, evaluasi kondisi barang modal, serta perhitungan kebutuhan penambahan atau penggantian investasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Aspek kelayakan proyek yang dinilai meliputi aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial, dan distribusi manfaat, untuk memastikan proyek tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak positif secara sosial dan berkeadilan. Berbagai teknik penilaian investasi seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Cost-Benefit Analysis*, dan *Payback Period* diterapkan sebagai alat untuk menilai manfaat dan biaya proyek secara komprehensif, sehingga keputusan investasi dapat didukung dengan data yang kuat dan analisis yang akurat.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan investasi publik antara lain tingkat suku bunga, kebijakan pengeluaran pemerintah, risiko dan ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kualitas tata kelola dan institusi, ketersediaan infrastruktur, dan dinamika demografis seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi publik menjadi sangat krusial agar tercipta kepercayaan dari masyarakat dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan

masyarakat sejak tahap awal, investasi publik dapat menjadi pendorong utama pembangunan yang adil, efisien, dan berkelanjutan untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.

3.2 Saran

Demikianlah pokok bahasan yang dapat kami paparkan. Makalah yang kami buat ini belum bisa disebut sempurna karena masih terdapat banyak kesalahan. Sebab penulis masih keterbatasan pengetahuan dan referensi. Oleh karena itu, kami sebagai penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan pembaca demi perbaikan makalah ini kedepannya agar dapat membuat tulisan yang bermanfaat bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., Perdana, H., & Ekanindya, R. (2025). Faktor-Faktor Penentu Keputusan Investor untuk Membiayai Infrastruktur Publik di Indonesia melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 14(2), 45–59.
- Assani, W. M., Meiyenti, I., & Tumija. (2025). Investasi Modal Publik dan Pertumbuhan Daerah: Implikasi Fiskal dari Pembangunan IKN. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 13(2), 88–99.
- Ediningsih, S. I., & Yacobus, A. (2012). Pendekatan Model Penilaian dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(3).
- Fadhilah, R. A., & Dewi, F. A. (2025). Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang: Analisis Kebijakan Publik dan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 4(3), 33–39.
- Hafriandi, A., & Gunawan, E. (2018). Pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 399-407.
- Hidayat, F., Fahmi, R., Anggraini, W., & Malik, A. (2024). Efektivitas Program Investasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 6485-6491.
- Makmur, M. F. D., Nurbayani, S. U., & Fitrianti, R. (2024). Tinjauan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 3(1), 15–24.
- Mukmin, M. N., Kusuma, I. C., & Susandra, F. (2023). *Investasi Sektor Publik: Perspektif Akuntansi dan Pelayanan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Murwani, A. S. (2011). Analisis Investasi Pada Sektor Publik. Wahana: *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 14(1), 39-51.

STUDI KASUS

Pengembangan Sistem Transportasi Umum di Kota Bandung

Kota Bandung mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kendaraan pribadi dan kemacetan lalu lintas menjadi masalah utama yang berdampak negatif pada produktivitas, polusi udara, dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bandung berencana melakukan investasi publik besar-besaran dalam pengembangan sistem transportasi umum.

Program tersebut meliputi beberapa inisiatif utama: pembaruan dan penambahan armada bus yang ramah lingkungan, pembangunan jalur khusus bus agar perjalanan lebih cepat dan efisien, serta pengembangan aplikasi transportasi terintegrasi yang memudahkan akses dan pembayaran bagi pengguna. Pemerintah juga berencana melakukan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Pemerintah ingin memastikan bahwa investasi ini memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan transportasi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana Pemerintah Kota Bandung dapat memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem transportasi umum ini benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat? Pendekatan atau indikator apa yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini?
2. Apa saja faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Bandung agar investasi ini tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota, terutama dalam konteks penggunaan transportasi umum yang lebih luas?